

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Posisi Selat Malaka merupakan jalur SLOC (*Sea Lanes of Communication*) terpadat untuk perdagangan dan alur minyak dunia jika dibandingkan dengan selat-selat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan keamanan secara terpadu dan terintegrasi di antara *litoral state* yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Tidak hanya negara pantai, negara pengguna selatpun berkewajiban untuk menjaga keamanan di Selat Malaka. Akan tetapi, kewenangan negara pengguna selat terbatas atas yurisdiksi negara pantai. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pengelolaan pengamanan sebagaimana perjanjian tahun 1971 antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Dalam perkembangan keamanan di Selat Malaka, diperlukan bantuan navigasi demi keselamatan kapal dan pelayaran. Jepang telah melakukan bantuan navigasi selama tiga puluh tahun. Bahkan, inisiatif Jepang dan Amerika Serikat adalah menawarkan kerjasama patroli di Selat Malaka.

Atas tawaran ini, Indonesia dan Malaysia menolak karena lintasan perairan Selat Malaka adalah termasuk wilayah kedaulatan negara tersebut. Akibat dari penolakan yang konsisten dari Indonesia dan Malaysia, muncul laporan-laporan yang tidak bertanggungjawab tentang keamanan di Selata Malaka. IMB merupakan salah satu badan yang mengkampanyekan bahwa Selat Malaka rawan akan kejahatan transnasional.

Berdasarkan laporan-laporan tersebut, muncul isu politisasi dan internasionalisasi yang menganggap bahwa masalah pengamanan Selat Malaka menjadi tanggungjawab bagi negara pengguna selat atau yang berkepentingan. Di samping tanggungjawab keamanan, isu yang tak kalah penting adalah Progran PSI yang digagasa Amerika Serikat untuk melakukan interdiksi di wilayah perairan laut bebas maupun perairan nasional.

Respon para akademisi dan politisi ada yang mendukung namun ada juga yang tidak mendukung. Hal ini dibaca sebagai proses sekuritisasi isu di Selat Malaka. Oleh karena itu, segala bentuk upaya dalam mencari rasionalisasi isu keamanan di Selat Malaka dibentuk dengan menghadirkan konsepsi sekuritisasi.

Kiranya, bahaya penggalangan publik oleh media mengenai sekuritisasi Selat Malaka tidak menjadikan pemerintah yang berdaulat membuka kesempatan melibatkan pihak asing dalam kerjasama keamanan, karena sistem dan pengelolaan Selat Malaka sudah cukup dan berhasil dikembangkan pada tataran konsep maupun operasionalisasi di lapangan.

4.2. Rekomendasi

Tantangan dalam mengelola isu keamanan Selat Malaka sekarang dan dimasa depan mencakup langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu selat yang dianggap nyata, misalnya keamanan navigasi, manajemen lingkungan dan kesenjangan persepsi yang muncul akibat tiadanya sensitivitas yang lebih besar terhadap keamanan di Selat Malaka. Oleh karena itu, respons yang diperlukan sifatnya harus tepat dan terarah dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan keamanan yang komprehensif di Selat Malaka.

Patroli terkoordinasi yang dilakukan oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia merupakan bentuk kerjasama keamanan yang patut dicontohi. Hal ini menjadi rekomendasi terhadap selat-selat yang merupakan jalur internasional. Tanpa ada kerjasama, maka segala bentuk ancaman keamanan tidak akan dapat di atasi.

Dalam hal ini kerjasama yang dimaksudkan adalah terbatas tanpa mengganggu kepentingan nasional maupun kedaulatan setiap negara. Prinsip kerjasama ketiga negara hendaknya dilandasi itikad baik dan penghormatan kedaulatan negara dalam menjaga keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Hal ini diharapkan untuk mengurangi *residual* isu-isu keamanan di Selat Malaka khususnya menyangkut kewenangan teritorial, zona ekonomi eksklusif dan mempertegas wilayah kedaulatan negara. Dengan demikian, proses sekuritisasi isu

keamanan di Selat Malaka dapat diperkecil resikonya apabila salah satu negara pantai melakukan kerjasama keamanan dengan negara lainnya.

Ada beberapa rekomendasi merujuk artikel “*Selat Malaka: Fakta Pergulatan Kekuatan dan Fear Factor*” yang ditulis Bantarto Bandoro, yakni:

- a. memperbanyak inisiatif dan kerjasama internasional, khususnya antar negara-negara pantai sesuai mekanisme yang telah berjalan;
- b. memaksimalkan kesadaran akan pentingnya wilayah Selat Malaka (*domain awareness*). *Domain awareness* ini memungkinkan dilakukannya identifikasi awal terhadap ancaman potensial dan meningkatkan respons yang memadai;
- c. menggelar keamanan berlapis yang menyatukan langkah-langkah publik dan privat. Sektor publik dan privat dapat bertindak bersama-sama misalnya untuk mencegah tindakan-tindakan kriminal dengan menerapkan langkah-langkah yang saling melengkapi.

Secara lebih spesifik, pendekatan berlapis terhadap keamanan maritim di Selat Malaka ini adalah menerapkan langkah-langkah keamanan terhadap titik-titik di wilayah selat yang dianggap rawan.